



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BPS PROVINSI JAWA TENGAH
SUB UNIT KERJA : BPS KABUPATEN/KOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KISMIA HARTATIK
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BPS KOTA PEKALONGAN
3. NHK : 468905

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 368.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m²/160 m² di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 175 m² di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m²/40 m² di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 191.250.000

1. MOBIL, AVANZA E Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
2. MOBIL, KARIMUN ESTILO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.050.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.300.533

F. HARTA LAINNYA Rp. 24.819.408

Sub Total Rp. 654.419.941

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 654.419.941

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.